

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang membahagiakan seluruh bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Semua usaha tersebut mengacu pada Pancasila dan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Upaya merealisasikan cita-cita tersebut telah dilaksanakan melalui proses pembangunan nasional (BANGNAS), dengan menggunakan dasar konsep Wawasan Nusantara (WASANTARA). Dalam konsep itu tercakup pengertian perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi dan kesatuan pertahanan-keamanan. Demikian pula dalam GBHN telah dinyatakan bahwa untuk dapat tetap memungkinkan berlangsungnya BANGNAS secara aman dan lancar, perlu dipelihara terus menerus Ketahanan Nasional (TANNAS) yang tangguh dan sebaliknya dengan TANNAS yang tangguh akan lebih mendorong lagi BANGNAS.

Modal Dasar BANGNAS yang strategis sifatnya adalah sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM), di mana proses pengembangannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Pengembangan SDA tersebut dalam BANGNAS dan TANNAS memerlukan proses pengolahan dan pengelolaan oleh manusia. Manusia sebagai sumberdaya dapat berperan baik sebagai pemrakarsa, pemikir dan pengambil keputusan maupun sebagai pelaksanaan operasional dalam arti yang luas. Umumnya mereka terorganisir dalam suatu bentuk wadah organisasi pelaku ekonomi atau lembaga Pemerintahan, di samping dalam bentuk kegiatan perorangan. Produk yang dihasilkan harus dapat dimanfaatkan dan diamankan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Secara yuridis normative pengaturan kegiatan pelaku ekonomi dalam pengembangan SDA tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Lebih lanjut penjelasan mengenai pasal tersebut telah menggariskan hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan SDA tujuan dan orientasi proses pengembangan SDA serta para pelaku ekonomi yang terkait dalam proses tersebut. Di samping itu, keseluruhan pasal 33 tersebut beserta penjelasannya, mengandung unsur-unsur dasar pelaksanaan demokrasi ekonomi dalam Sistem Perekonomian Nasional (SPN)

Kegiatan pelaku ekonomi dalam pengembangan SDA ternyata tidak terlepas dari berbagai masalah, sebagai akibat dari perkembangan lingkungan yang dinamis. Justru di saat proses pengembangan SDA dituntut mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi BANGNAS, secara bersamaan proses tersebut harus menghadapi masalah-masalah yang mendasar sifatnya. Hal itu nampak dalam hubungan dengan upaya

meningkatkan efisiensi dan produktivitas kegiatan usaha, yang pada gilirannya dapat menciptakan nilai tambah, perluasan lapangan kerja yang produktif, dan peningkatan sumbangan nyata terhadap neraca pembayaran utang luar negeri kita.

Salah satu penyebab pokok permasalahan tersebut adalah adanya ketidakseimbangan tata peran dan hubungan keterkaitan yang saling melengkapi dalam pengembangan SDA di antara para pelaku ekonomi, yang terdiri dari pelaku ekonomi di sektor Koperasi dan di sektor Swasta.

B. Maksud dan Tujuan

Buku ini disusun dengan maksud untuk menyampaikan hasil penelitian gagasan mengenai tata peran dan hubungan keterkaitan yang saling mengisi dan melengkapi di antara para pelaku ekonomi di sektor Negara [BUMN], sektor Koperasi dan Sektor Swasta dalam proses pengembangan SDA dengan melandaskan diri pada doktrin WASANTARA dan TANNAS.

Adapun tujuan dari penelitian gagasan itu adalah untuk dapat merumuskan pokok-pokok pikiran, yang dapat membantu upaya menciptakan keseimbangan tata peran pelaku ekonomi dalam proses pengembangan SDA yang sesuai dengan Demokrasi Ekonomi. Hal ini sesuai dengan tujuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus memperkuat TANNAS. Pokok-pokok pikiran tersebut, untuk selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijaksanaan dan strategi BANGNAS di masa mendatang.

Dalam hubungannya dengan tujuan tersebut di atas, secara lebih terarah pembahasan masalah dalam buku ini diharapkan dapat membantu menjabarkan secara lebih operasional upaya-upaya yang dapat mendukung program pembangunan jangka panjang.

Buku ini sekaligus diharapkan dapat menjadi faktor penyambung (*linking*) dari rangkaian pokok-pokok pikiran, sejak mulai konsepsi disiplin nasional sebagai hasil dari seminar KRA XVI. Kemudian dilanjutkan dengan konsepsi SISMENAS sebagai hasil dari seminar KRA XVII. Akhirnya pembahasan buku ini diharapkan dapat pula menjadi masukan bagi seminar Sistem Ekonomi Pancasila, yang direncanakan akan dilaksanakan pada waktu-waktu mendatang.

C. Pendekatan dan Metodologi Pengkajian

Pendekatan pengkajian dilakukan dengan memanfaatkan analisis kesisteman yang bersifat koperhensif integral, melalui proses pemecahan persoalan yang berlandaskan pada falsafah Pancasila, konsep UUD 1945, logika WASANTARA dan bahasan TANNAS.

Dalam proses penelitian gagasan untuk menghasilkan suatu model tata peran yang dimaksudkan di muka, telah dilakukan studi pustaka, dengan menggali berbagai informasi dan konsep-konsep yang dikembangkan LEMHANAS, hasil karya perorangan, bahan-bahan kursus dan hasil-hasil diskusi. Selanjutnya penulisan buku ini disusun dan dirangkum ke dalam bentuk berbagai variable model, yang diharapkan dapat menjelaskan pola keseimbangan tata peran tersebut.

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan utama dititik beratkan pada aspek-aspek strategis dalam hubungan antara peran pelaku ekonomi dalam pengembangan SDA dengan proses BANGNAS dan TANNAS, yang antara lain mencakup:

Pertama, pengertian dan peran SDA dalam kegiatan pembangunan ekonomi nasional yang berazaskan trilogi pembangunan, terutama dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan nilai tambah, perluasan lapangan kerja produktif, dan peningkatan serta pengamanan neraca pembayaran utang luar negeri.

Kedua, pengkajian mengenai tata peran dan mekanisme hubungan antar pelaku ekonomi dalam rangka mengembangkan SDA secara maksimal. Dalam buku ini pengertian pelaku ekonomi mencakup sektor Negara (BUMN), Koperasi dan sektor Perorangan (Swasta).

Ketiga, pengkajian mengenai kekuatan model tata peran antar pelaku ekonomi dalam hubungannya dengan peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional, untuk dapat menangkal ancaman, tantangan gangguan dan hambatan (ATGH) pada bangsa kita. Tentu juga untuk memperjelas wajah Demokrasi Ekonomi dalam tata ekonomi nasional yang sesuai dengan UUD 1945.

E. Pengertian Pokok

Untuk memberikan pengertian dan kesamaan persepsi teknis mengenai terminologi yang digunakan dalam buku ini, berikut dicantumkan penjelasan mengenai pengertian dari beberapa terminologi pokok, yaitu:

1. Garis-garis Besar Halua Negara (GBHN): adalah rumusan haluan Negara dalam garis-garis besarnya sebagai pernyataan kehendak rakyat, dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
2. Ketahanan Nasional (TANNAS): merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi ATGH, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tak langsung dengan maksud untuk melaksanakan perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional.
3. Model; merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki tujuan dan dinamika berdasarkan mekanisme operasional termasuk sub-sistem pengendalian yang melekat dalam model bersangkutan.
4. Pelaku Ekonomi: adalah semua lembaga atau perorangan yang melaksanakan pengambilan keputusan melalui pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian. Sampai pada tingkat tertentu hasilnya dapat mempengaruhi proses pemanfaatan dan pengembangan SDA.
5. Pembangunan Ekonomi: yaitu proses transformasi sumberdaya, termasuk di dalamnya sumberdaya alam.
6. Pengembangan Sumberdaya Alam; yaitu proses pengelolaan, pemanfaatan dan pengamanan sumberdaya alam

7. Peran pelaku Ekonomi: adalah semua kegiatan yang dilaksanakan pelaku ekonomi dalam suatu sistem tata peran tertentu berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya dalam mengemban misinya. Peran secara nyata ditunjukkan melalui implementasi kegiatan operasionalnya, yang dipengaruhi oleh tujuan dan ciri masing-masing para pelakunya.
8. Sistem: merupakan kesatuan dari berbagai bagian atau sub-sistem yang saling berhubungan, tergantung serta saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem ini mempunyai tujuan dan sifat-sifat yang ditentukan oleh interaksi dan interrelasi antar sub-sistem yang satu dengan sub-sistem yang lainnya.
9. Sistem Manajemen Nasional (SIMENAS): merupakan serangkaian proses pengambilan keputusan berwenang (TPKB), yang memiliki komposisi sistem dalam (*inner system*) yang terdiri atas Tata Administrasi Negara (TAN) dan Tata Laksana Pemerintahan (TLP), serta sistem luar (*outer system*) yang terdiri atas Tata Kehidupan Masyarakat (TKM), dan Tata Politik Nasional (TPN). Sistem ini akan mengolah pendapat masyarakat dan pendapat politik yang timbul sebagai masukan bagi proses pengambilan keputusan yang berwenang dalam TAN dan TLP.
10. Sistem Perekonomian Nasional (SPN): yaitu cara masyarakat Indonesia dalam mengorganisir faktor-faktor produksi dan menuangkannya ke dalam struktur kelembagaan bagi proses BANGNAS.
11. Sumberdaya Alam (SDA): secara teknis dimaksudkan sebagai semua temuan manusia dari alam, yang dapat digunakan bagi keperluan hidupnya. Dalam hubungan dengan TANNAS, SDA dikenal sebagai kekayaan alam (KA) suatu bangsa, yang terdiri atas segala bentuk nyata dan potensi alam yang diperoleh di atas permukaan serta di dalam bumi dan laut, yang berada di wilayah kekuasaan/yuridiksi suatu negara.
12. Sumberdaya Manusia (SDM): adalah semua orang yang mendiami suatu wilayah tertentu dan yang memiliki potensi untuk menghasilkan karya tertentu, baik dengan cara mengolah SDA secara langsung maupun tidak langsung.
13. Wawasan Nusantara (WASANTARA): adalah wawasan dalam mewujudkan tujuan BANGNAS, yang mencakup pandangan bahwa rakyat, bangsa, negara dan wilayah nusantara (darat, laut, udara) merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Dalam BANGNAS, wawasan ini mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi dan kesatuan pertahanan-keamanan.

F. Sistematika Penulisan

Uraian dalam buku ini akan mengikuti alur pikiran sebagai berikut; Bab satu berisi pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan pola dan pikiran yang melandasi penulisan buku ini. Demikian pula dicakup

maksud dan tujuan serta pendekatan dan metode pengkajian yang digunakan dalam pembahasan.

Bab dua berisi studi terhadap peran pelaku ekonomi dalam pengembangan sumberdaya alam. Bab ini menguraikan pengertian, potensi serta ciri pelaku ekonomi. Selanjutnya pembahasan dihubungkan dengan peranan pelaku ekonomi dalam proses pengembangan SDA dan keterkaitannya pada BANGNAS dan TANNAS, yang didasarkan pada WASANTARA.

Bab tiga berisi analisa terhadap pelaku ekonomi dalam pengembangan sumberdaya alam. Bab ini memuat uraian mengenai hasil BANGNAS yang telah dicapai hingga saat ini dan berbagai kondisi yang memberikan dampak negatif terhadap pencapaian sasaran BANGNAS tersebut. Bab ini juga menjelaskan masalah strategis yang muncul dalam hubungannya dengan proses penyiapan kondisi tinggal landas. Pembahasan diakhiri dengan menunjukkan aspek strategis yang terkait dengan tata peran dari pelaku ekonomi dalam proses BANGNAS.

Bab empat berisi bentuk analisa keseimbangan tata peran pelaku ekonomi. Bab ini mencakup uraian mengenai dasar dan pola pemikiran atas konsep ideal dari model keseimbangan tata peran antar pelaku ekonomi yang dihubungkan dengan upaya mempersiapkan sumberdaya manusia yang handal. Uraian dilengkapi dengan tujuan model, kendala model, mekanisme interaksi dan inter-relasi dari komponen pelaku ekonomi. Uraian tersebut mencakup pula ciri dan tingkah laku model yang harus diwujudkan agar dapat mengoptimalkan tata peran yang dimaksud, di samping pembahasan sistem pengendaliannya.

Bab lima berisi usulan penerapan dan implikasi model terhadap pembangunan nasional. Bab ini memuat penjelasan mengenai bagaimana pola operasionalisasi proses penerapan modelnya, serta bagaimana menggerakkan proses tersebut dalam hubungannya dengan SISMENAS dan asas-asas kepemimpinan serta imlikasinya terhadap proses pembinaan TANNAS.

Bab enam adalah penutup. Bab ini diakhiri dengan penyampaian kesimpulan dan saran-saran untuk keperluan penerapan model dalam kegiatan ekonomi yang sedang dan akan berlangsung masa mendatang.